

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam mesosialisasikan program sosial dan kemanusiaan. Organisasi ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 21 April 2005. ACT memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl. TB, Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Adapun pengembangan aktivitas ACT mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta memiliki program berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan waqaf. Sejak tahun 2012, ACT telah mentransformasikan diri sebagai lembaga kemanusiaan yang memiliki ruang lingkup global. Aksi Cepat Tanggap berkiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan diberbagai penjuru dunia seperti bencana alam, kekeringan, kelaparan, konflik dan peperangan (ACT, 2018).

Selama hampir lima puluh tahun, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut. Pendudukan Israel dan penawanan penduduk Palestina masih menjadi masalah yang umum. Sebuah laporan dari konferensi PBB mengenai pembangunan dan perdagangan (UNCTAD) menyatakan bahwa wilayah Palestina yang dikenal sebagai Gaza adalah penjara terbesar di dunia. Laporan tersebut menyatakan bahwa blokade Israel di jalur Gaza menghalangi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, wilayah kecil itu dapat menjadi tidak layak huni,

menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Schlein, 2018). Terbukti pada saat ini wilayah tersebut sudah tidak layak huni akibat konflik yang berkepanjangan.



Gambar 1. 1 wilayah Palestina yang selalu berkurang dari tahun ke tahun karena aneksasi Israel

Konflik antara Israel dan Palestina berkisar pada beberapa topik utama. Masalah perbatasan, masalah air, masalah Yerusalem, masalah pemukiman, dan masalah pengungsi setidaknya merupakan lima permasalahan utama yang perlu ditangani. Salah satu masalah politik utama yang dihadapi Timur Tengah adalah sumber daya air. Di wilayah yang persediaan airnya langka, air mungkin memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan minyak. Oleh karena itu, salah satu poin utama konflik Israel-Palestina adalah kelangkaan air. Karena efisiensi penggunaan sumber daya air, Israel memiliki akses yang mudah terhadap pasokan air, sementara Palestina semakin kesulitan mendapatkan air yang cukup.

Menurut Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri Israel, kelangkaan air adalah salah satu faktor yang menyebabkan Perang Enam Hari pada tahun 1967. (Darwish, 2003). Menurut Bank Dunia, Israel mengonsumsi 90% air di Tepi Barat, meskipun mereka merupakan minoritas di wilayah tersebut. (Chesnot, 2000). Menurut hukum internasional, Israel mempunyai kewajiban hukum untuk menyediakan air ke wilayah Palestina. Namun demikian, Israel secara efektif memanfaatkan lebih dari

80% sumber daya air terbarukannya. Israel juga mengambil lebih dari 50% air di wilayah tersebut secara berlebihan. Ekstraksi berlebihan mengurangi kapasitas untuk mengisi kembali air di akuifer, membahayakan kelangsungan hidup akuifer dalam jangka panjang, dan menyebabkan penurunan aksesibilitas air bagi penduduk Palestina. (Salem, 2010).

Menurut statistik, 95% air di Jalur Gaza terkontaminasi dan tidak aman untuk diminum, yang akan menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat (Assembly, 2011). Sekitar 26% penyakit yang dialami penduduk Jalur Gaza disebabkan oleh asupan air yang tidak layak untuk diminum. Pemberlakuan blokade Israel terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2006, ditambah dengan serangan militer Israel pada tahun 2008-2009, mengakibatkan rusaknya infrastruktur air dan sanitasi di Gaza. Akibatnya, kurangnya perhatian terhadap proyek pembuangan limbah menyebabkan penurunan kualitas air yang bersumber dari akuifer akibat kontaminasi. Hanya 5% air di lokasi tersebut yang memenuhi kriteria kualitas air minum (Salem, 2010).

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menyatakan bahwa sistem pasokan air bersih Jalur Gaza hancur akibat serangan udara Israel. Peristiwa tersebut mempengaruhi layanan listrik dan air bersih. Ketika listrik mati, otomatis air bersih pun tidak bisa diakses sehingga ratusan ribu penduduk sulit untuk mendapatkan air bersih. Selain itu, ketika pertempuran berlangsung membuat para teknisi tidak bisa memperbaiki kerusakan sistem penyedia air bersih. Sejumlah teknisi air bersih di Gaza turut menjadi korban tewas dalam serangan udara Israel, sehingga perusahaan penyedia air bersih Gaza menunda semua perbaikan demi keselamatan pekerja. Hal

ini menyebabkan kelangkaan air bersih, seiring dengan kenaikan suhu yang terus terjadi di wilayah tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan masyarakat Gaza rentan terhadap berbagai penyakit.

Bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang diberikan dalam rangka menyelamatkan hidup, meringankan penderitaan, memelihara serta memberikan perlindungan selama atau pasca terjadinya krisis tanpa disertai kepentingan politik. Termasuk bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Indonesia terhadap penduduk Gaza yang menjadi korban akibat konflik antara Palestina dan Israel. ACT merupakan salah satu pelopor bagi lembaga kemanusiaan global lainnya agar turut aktif dalam menangani berbagai isu-isu kemanusiaan dunia. Dalam konsentrasinya terhadap isu krisis air bersih di jalur Gaza, ACT telah melakukan berbagai upaya agar penduduk yang tinggal di jalur Gaza terpenuhi hak-hak hidupnya dengan menciptakan berbagai upaya untuk menunjang tercukupinya kebutuhan penduduk serta terjun langsung ke lapangan membantu penduduk Gaza. Beberapa upaya yang dilakukan ACT terhadap konflik yang terjadi seperti mengirim 1000 ton logistik yang didalamnya termasuk air bersih, ACT telah melakukan upaya darurat untuk membantu masyarakat Palestina dengan memberikan air bersih yang merupakan prioritas utama mereka, serta pembangunan infrastruktur berupa sumur-sumur wakaf sebagai bentuk tindakan nyata keseriusan ACT dalam merespon isu krisis air bersih ini. Selain itu ACT juga telah membuka kantor cabang di jalur Gaza untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan kepada penduduk setempat serta agar lebih dekat dengan korban konflik.

Dari berbagai upaya-upaya yang dilakukan ACT diatas berdampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup penduduk Gaza. Namun terlepas dari berbagai upaya tersebut, tentu tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa penduduk Gaza telah mendapatkan hak-haknya secara berkelanjutan apabila konflik antara Palestina dan Israel ini belum menemukan titik terangnya. Oleh karena itu, isu ini harus selalu disuarakan agar dapat menekan, meredam atau bahkan mengubah kebijakan konflik serta berpotensi mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional sehingga dapat melemahkan atau bahkan memadamkan konflik yang telah merugikan banyak orang ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana upaya Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menanggulangi krisis air bersih di Gaza, Palestina?”**

1.3 Kerangka Konseptual

Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab rumusan masalah diatas, maka diperlukan kerangka dasar pemikiran berupa konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Sedangkan menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu konsep merupakan gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi konsep sangat beragam, akan tetapi secara garis besar konsep memiliki fungsi utama yaitu untuk mempermudah seseorang dalam memahami

suatu hal. Hal ini dikarenakan sifat dari konsep itu sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami. Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep yang paling efektif untuk digunakan dalam permasalahan ini adalah konsep *Non-Governmental Organization* dan *Transnational Advocacy Network*.

a) NGO (Non-Governmental Organization)

NGO adalah organisasi atau lembaga yang beroperasi di luar kendali pemerintah dan bersifat nirlaba. Tujuan utama NGO adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mengatasi berbagai isu yang berhubungan dengan kepentingan publik, sosial, atau politik. NGO dapat beroperasi di berbagai bidang, seperti kesehatan, lingkungan, hak-hak perempuan, advokasi politik, dan pemberdayaan masyarakat. Secara global NGO berperan penting dalam mengatasi berbagai isu global dan meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh dunia (Tujil, 1999).

Menurut Tujil: “NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi independen, nonpartisan, non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termarjinalkan.” NGO bukanlah bagian dari pemerintahan namun merupakan elemen dari masyarakat madani yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dengan melakukan tindakan nyata dan merupakan sebuah organisasi independen yang bersifat sosial.

Definisi NGO menurut Lewis adalah: “Organisasi non-pemerintahan merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui

sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik.” (Hurwitz, 2001).

Fungsi operasional NGO mencakup merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung membawa perubahan bagi kondisi orang, artefak budaya, atau lingkungan alam. Contohnya meliputi pembangunan, bantuan pangan, perawatan kesehatan, perlindungan bangunan bersejarah, perlindungan kesehatan hewan, dan konservasi alam. Selain itu, NGO juga berperan dalam advokasi untuk mempengaruhi pendapat, kebijakan, dan praktik otoritas nasional dan internasional, kelompok sosial, badan usaha, serta masyarakat umum. Meskipun mereka tidak selalu dapat mengubah kondisi realitas secara langsung, mereka dapat melakukannya dengan mempengaruhi para perantara (Lewis, 2009).

ACT, atau Aksi Cepat Tanggap, adalah sebuah organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization, NGO) yang beroperasi di tingkat global. ACT (Action Against Hunger) berperan sebagai NGO internasional yang berfokus pada setiap tragedi kemanusiaan diberbagai penjuru dunia seperti bencana alam, kekeringan, kelaparan, konflik, serta peperangan.

Air bersih menjadi hal dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat bertahan. Konflik dan peperangan yang terjadi dalam suatu wilayah dapat memperburuk kualitas atau mencemari air bersih yang tersedia. Terlebih lagi apabila terdapat aktor yang lebih kuat atau pemenang yang dapat mengendalikan kebijakan terhadap penggunaan air bersih. Tentu saja pihak yang lebih lemah akan mengalami kesulitan. Dalam kekacauan yang terjadi akibat konflik antara Palestina dan Israel di jalur Gaza, Aksi Cepat Tanggap (ACT) kerap berkontribusi agar dapat

memenuhi serta memastikan hak atas kebutuhan dasar penduduk yang menjadi korban konflik, salah satunya adalah air bersih. Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas, dampak dari konflik antara Israel dan Palestina menyebabkan wilayah ini mengalami krisis air bersih. Merespon keadaan tersebut, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menciptakan beberapa program serta memfasilitasi air bersih agar penduduk Gaza bisa mendapatkan akses terhadap ketersediaan air bersih, serta dapat memanfaatkan dengan sebaik-bijaknya air tersebut.

b) *Transnational Advocacy Network (TAN)*

Transnational Advocacy Network (TAN) atau jaringan advokasi transnasional merupakan bentuk gerakan kelompok advokasi atau aktor non-negara yang mampu memengaruhi sistem politik nasional maupun internasional untuk mencapai atau mempresentasikan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam TAN, aktor non-negara dapat terdiri dari organisasi internasional non-pemerintah (INGOs), organisasi non-pemerintah (NGO), gerakan sosial lokal, yayasan, maupun media yang melibatkan diri dalam isu-isu spesifik. Peran aktor non-negara dalam TAN bersifat sentral dalam politik internasional, salah satunya yaitu dapat melakukan tindakan serta menekan aktor yang lebih kuat, salah satunya yaitu negara. Fokus *Transnational Advocacy Network (TAN)* oleh aktor non-negara dapat mencapai aspek-aspek yang bersifat material maupun non-material, lalu diubah menjadi isu internasional melalui advokasi yang dilakukan (Soetjipto, 2018).

Untuk mencari dukungan kekuatan, aktor TAN harus menggunakan strategi yang dapat mempengaruhi aktor lain untuk ikut serta dalam menyuarakan masalah,

mengajak aktor lain, dan memberikan tekanan pada pemerintah atau aktor lain yang ditargetkan. Menurut Keck dan Sikkink, ada empat strategi yang digunakan ;

1. *Information Politics*, menggunakan informasi yang relevan untuk dapat "dimobilisasi" atau "dipolitisasi" dengan menyampaikan informasi ke lokasi yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang paling kuat untuk memengaruhi target. Media sangat penting dalam politik informasi untuk membangun jejaring atau sekutu untuk menarik perhatian dan menjangkau khalayak luas dengan menggunakan cara yang dramatis.
2. *Symbolic Politics*, menggunakan benda atau ide yang dapat digunakan sebagai simbol, yang dapat menjelaskan dan merepresentasikan makna peristiwa yang terjadi serta tujuan yang ingin dicapai melaluinya, sehingga mudah dipahami masyarakat. Kepahaman masyarakat terhadap simbol sangat penting karena dapat meningkatkan pengaruh dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. *Leverage Politics*, kemampuan untuk mengajak aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi masalah dengan memberikan bantuan, baik secara material, seperti dana dan barang-barang yang diperlukan, atau non-material, seperti memberikan tekanan dengan membentuk "mobilisasi rasa malu", di mana perilaku target yang menyimpang dari moral dan kewajiban internasional dapat diungkit di arena internasional, meningkatkan tekanan

pada mereka.

4. *Accountability Politics*, yaitu kemampuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik dengan melawan kebijakan yang dibentuk oleh target, kemudian berusaha untuk meyakinkan target untuk dapat mengubah kebijakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan prinsip yang ada.

Agar komitmen dapat dipertanggung jawabkan, perubahan harus diikuti dengan dokumen tertulis dan legal. Untuk memantau perilaku dan praktik target terhadap komitmen yang ada, masyarakat internasional menggunakan komitmen tersebut sebagai dasar.

Selain itu, Keck dan Sikkink mengembangkan pola boomerang—atau pola boomerang—yang menggambarkan bagaimana organisasi non-negara dapat menangani pelanggaran hak asasi manusia ketika suatu negara melanggar atau menolak untuk mengakui hak-hak individu atau kelompok yang tidak dapat dikomunikasikan secara politik. Akibatnya, organisasi non-negara harus mencari koneksi internasional untuk mengungkapkan masalahnya dan mencari perlindungan (Keck, 1998). TAN beroperasi dengan menggunakan teknik persuasif dan pembingkaihan isu, serta menggunakan taktik sosialisasi yang mungkin termasuk memberikan tekanan untuk mengubah atau menolak kebijakan negara yang dianggap tidak sesuai dan merugikan. Kampanye global dapat secara efektif menggunakan persuasi dengan mempengaruhi atau menggalang dukungan masyarakat (Alfredson, 2008).

Dalam hal ini, *indonesian Humanitarian (IHC)* Merupakan interpretasi dari keseriusan aksi cepat tanggap terhadap isu yang terjadi jalur gaza. IHC resmi menjadi pusat bantuan kemanusiaan ACT pada awal Maret 2019 yang ditujukan untuk mengintegrasikan program-program yang dijalankan ACT. Program-program tersebut antara lain sumur wakaf yang dibangun titik-titik yang mengalami krisis air bersih. Program lainnya adalah *humanity water tank* yang memberikan pasokan air bersih pada setiap harinya dipemukiman warga, fasilitas umum seperti sekolah, masjid, klinik, serta tempat umumnya yang berada di jalur gaza. Dalam hal ini ACT telah mempresentasikan *symbolic politics* dengan baik.

Dalam *leverage politics*, Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga berupaya dalam menyorotkan isu-isu krisis air bersih yang terjadi di wilayah Gaza sehingga mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Tindakan tersebut berkemungkinan dapat menekan atau bahkan mengubah kebijakan dari aktor negara yang berkonflik agar dapat menjamin kebutuhan air bersih untuk warga sipil. Diketahui Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam merespon isu yang terjadi di jalur Gaza, salah satunya adalah gerakan kerja sama antara ACT dan mitra ACT yang berada di Gaza. Selain itu ACT juga aktif dalam menggunakan kekuatan media sosial seperti Instagram, Twitter, Youtube, Facebook, dan juga website resmi ACT untuk menyebarkan informasi (*information politics*) terkait krisis air bersih di Gaza sehingga berdampak pada keterlibatan publik dalam memberikan bantuan serta menyerukan perdamaian. Selain itu, ACT juga kerap menyerukan pesan perdamaian melalui

poster atau gambar, beserta slogan-slogan kampanye atau tagar seperti *#SavePalestine* (Shabita A. A., 2019).

1.4 Hipotesa

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan teori konseptual yang telah diuraikan diatas maka argumen sementara dari upaya ACT dalam krisis air bersih yang terjadi di jalur Gaza antara lain :

1. Dalam menjalankan advokasi, ACT melaksanakan *leverage politics* dalam menyuarakan isu-isu krisis air bersih yang terjadi di wilayah Gaza sehingga mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional.
2. ACT juga menerapkan *symbolic politics* yang memberikan pasokan air bersih pada setiap harinya dipemukiman warga serta membangun sumur-sumur wakaf di beberapa titik wilayah yang terdampak krisis air bersih di jalur Gaza.
3. ACT juga menjalankan *information politics* dengan menyuarakan isu krisis air di jalur Gaza melalui platform sosial media.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari (artikel di internet, media masa, buku, dan jurnal yang dianggap memiliki sumber yang jelas) atau disebut teknik pengumpulan data library research. Analisi data dijelaskan menggunakan deskriptif analitik.

1.6 Jangkauan Penelitian

Penulis akan memfokuskan batasan tempat dalam penelitian ini hanya berada di wilayah jalur Gaza dan sekitarnya yang terdampak krisis air bersih akibat konflik antara Palestina dan Israel serta tempat dimana Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengembangkan program dan bantuan untuk penduduk lokal di jalur Gaza. Sedangkan rentang waktu yang diambil yaitu antara tahun 2012-2020. Di tahun 2012 ACT mentransformasikan diri sebagai lembaga kemanusiaan yang memiliki ruang lingkup global. Penulis memilih mengakhiri riset untuk penelitian ini pada tahun 2020.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi empat bab sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah ACT, konflik yang terjadi di Gaza, ketersediaan pasokan air bersih di Gaza, upaya penduduk lokal untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dampak dari krisis air bersih di Gaza.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang bentuk dan implementasi program-program bantuan kemanusiaan ACT untuk menanggulangi krisis air bersih di Gaza.

BAB IV : Pada bab ini berisi kesimpulan dari berbagai temuan dalam analisa yang telah penulis lakukan selama penelitian berlangsung